

Judul : Produksi Petani kita mesti jadi Prioritas
Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Bali Tak Terima Beras Impor Produksi Petani Kita Mesti Jadi Prioritas

ANGGOTA Komisi IV DPR Firman Soebagyo mewanti-wanti Pemerintah agar beras impor tidak didistribusikan ke daerah sentra penghasil beras. Dia mendukung kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster yang menolak 10 ribu ton beras impor disimpan di Gudang Bulog wilayah Bali.

"Saya mendukung keberanian Gubernur Bali menolak masuknya beras impor ke wilayahnya. Saya berharap juga provinsi lain atau kepala daerahnya berani melakukan hal yang sama," kata Firman di Jakarta, kemarin.

Menurut Firman, sah-sah saja jika kepala daerah menolak beras impor masuk ke wilayahnya, asalkan produksi beras petani di daerahnya berlebih atau surplus.

Politisi senior Partai Golkar ini mengapresiasi kebijakan orang nomor satu Bali itu.

"Kalau memang surplus dan berkecukupan juga harus ditolak. Karena kalau sampai diterima, akan mengikis semangat untuk tetap bertani," sambung Firman.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengingatkan, negara sejatinya harus mampu menjamin kecukupan pangan melalui produktivitas petani. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pangan harus tersedia oleh negara, karena pangan adalah kebutuhan pokok dan merupakan hak asasi manusia.

Semangat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan, lanjut dia, juga menegaskan pentingnya bahwa kebutuhan pangan harus tersedia dan mengedepankan produk dalam negeri. Ini berarti, kebutuhan pangan

pokok beras harus dari petani lokal bukan dari impor.

"Jadi kalau Pemerintah Daerah menjamin seperti di Bali sudah surplus, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk pemenuhan stok beras itu didatangkan dari negara lain," katanya.

Atas dasar itu, dia meminta Pemerintah dapat lebih memahami spirit dan semangat dalam Undang-Undang Pangan. Jadi, beras impor yang nyata-nyata bukan hasil produktivitas para petani dalam negeri, tidak asal didistribusikan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Karena itu, dia menyayangkan kinerja Pemerintah yang terkesan jalan sendiri-sendiri, dan tidak ada koordinasi dalam masalah distribusi ataupun penyimpanan beras impor di gudang milik Pemerintah ini.

"Saya juga menyayangkan kalau Badan Pangan Nasional semangatnya tidak sesuai amanat dan spirit Undang-Undang Pangan tersebut. Sebagai pelaksana undang-undang, dia harusnya membaca dan memahami undang-undang Pangan tersebut," tandas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah III meliputi Pati, Rembang dan Grobogan ini.

Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster menolak 10 ribu ton impor beras disimpan di gudang Bulog Bali. Penolakan tersebut disampaikannya setelah mengetahui bahwa beras impor yang dibawa Bulog ini akan disimpan di Bali yang saat ini mengalami surplus produksi beras.

"Kalau Bulog mau beli beras, belilah beras dari hasil petani Kita di Bali, jangan beli beras dari negara luar, agar rakyat kita sejahtera," kata Koster. ■ KAL